

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETEPATAN WAKTU  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD  
DI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ELVI SOEPRIHATININGSIH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRACT

### THE FACTORS RELATED TO PUNCTUALITY OF FINANCIAL REPORT DELIVERY IN REGIONAL UNIT FORCE APPARATUS (SKPD) OF TULANG BAWANG REGIONAL GOVERNMENT

*By*

**ELVI SOEPRIHATININGSIH**

*The objectives of this research were to find out the correlations of educational background, training, facility ability, and regulation understanding to the financial report punctuality in the Regional Unit Force Apparatus (SKPD) of Tulang Bawang Regional Government.*

*This research used purposive sampling technique to gain 64 respondent samples containing of the head of financial sub division and expense treasury in the Regional Unit Force Apparatus (SKPD) who were directly involved in drafting financial reports. The research results showed that training, facility ability, and regulation understanding had significant correlations to the financial report punctuality in the Regional Unit Force Apparatus (SKPD), while educational background did not have a significant correlation.*

*Keywords : punctuality, delivering regional financial reports, education, training, facility ability, regulation understanding.*

**FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETEPATAN WAKTU  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD  
DI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

**ELVI SOEPRIHATININGSIH**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan latar belakang pendidikan, pelatihan, ketersediaan fasilitas, dan pemahaman peraturan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 64 orang yang terdiri dari kepala sub-bagian keuangan, dan bendahara pengeluaran pada perangkat SKPD yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan . Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelatihan, ketersediaan fasilitas, dan pemahaman peraturan memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD, sedangkan latar belakang pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Kata kunci : Ketepatan waktu, penyampaian laporan keuangan daerah, pendidikan, pelatihan, ketersediaan fasilitas, pemahaman peraturan.

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETEPATAN WAKTU  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD  
DI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

**ELVI SOEPRIHATININGSIH**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN KETEPATAN WAKTU  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN  
PADA SKPD DI PEMERINTAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

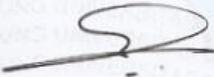
Nama Mahasiswa : **Elvi Soeprihatinningsih**

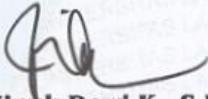
Nomor Pokok Mahasiswa : 0641031037

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



  
**Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19700817 199703 2 001

  
**Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19820220 200812 2 003

2. Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

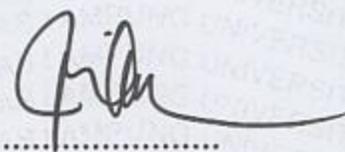
Ketua

: **Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.** .....



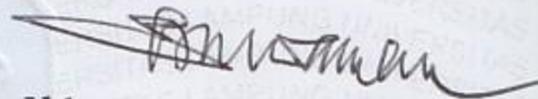
Sekretaris

: **Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt.** .....



Penguji Utama

: **Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.** .....

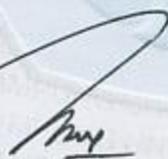


### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**

NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Juli 2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir dengan judul "Faktor –Faktor yang Berhubungan dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 016

Penulis



Elvi Soeprihatinningsih  
NPM 0641031037

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, tanggal 30 November 1971, sebagai putri pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Soeprapto dan Ibu Sumarjatun

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Xaverius Tanjung Karang tahun 1979, SD Xaverius Tanjung Karang tahun 1985, SMP Xaverius Tanjung Karang tahun 1988, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 1991. Diploma III Akuntansi diperoleh penulis di Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AA YKPN) Yogyakarta pada tahun 1996.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2006. Saat ini penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang diangkat sebagai pegawai sejak tahun 2000. Memiliki suami Dedi Hartono dan seorang putra Muhammad Taufiqurrahman.

## **MOTTO**

“Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah membimbingku selama ini.

Karya ini kupersembahkan kepada:

**Keluarga Besar Jurusan Akuntansi**

Serta

**Almamaterku Tercinta**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayangNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Faktor –Faktor yang Berhubungan dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang " sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si, Akt., sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Ninuk Dewi K, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, Mpok Nur, Pak Sobari, Mbak Tina, Mas Yogi, Mas Yana, Mas Ruli, Mas Leman dan karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
8. Kedua orang tua, suamiku Dedi Hartono dan ananda Opik atas doa dan dukungannya, demi kesuksesan dan keberhasilanku.
9. Mbak Tini, seluruh teman kantor, kerabat dan pihak lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

**Elvi Soeprihatinningsih**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                           | i       |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                | ii      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                 | iii     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                     | iv      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                      | v       |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....                       | vi      |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                           | vii     |
| <b>MOTTO</b> .....                                   | viii    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                             | ix      |
| <b>SANWACANA</b> .....                               | x       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                              | xii     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                            | xv      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                           | xvi     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                         | xvii    |
| <br>   |         |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                |         |
| 1.1 Latar Belakang.....                              | 1       |
| 1.2 Perumusan Masalah.....                           | 5       |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                           | 6       |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                          | 7       |
| <br>   |         |
| <b>II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b> |         |
| 2.1 Teori Sumber Daya Manusia.....                   | 8       |
| 1.2 Laporan Keuangan SKPD.....                       | 9       |
| 1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan .....              | 9       |
| 1.2.2 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan SKPD.....       | 9       |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.2.3 | Tujuan Laporan Keuangan KPD.....                     | 11 |
| 1.2.4 | Komponen Laporan Keuangan SKPD .....                 | 11 |
| 1.2.5 | Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah.....       | 15 |
| 1.3   | Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis..... | 16 |
| 1.3.1 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan.....             | 16 |
| 1.3.2 | Latar Belakang Pendidikan.....                       | 16 |
| 1.3.3 | Pelatihan .....                                      | 17 |
| 1.3.4 | Ketersediaan Fasilitas .....                         | 18 |
| 1.3.5 | Pemahaman Peraturan.....                             | 19 |
| 2.4   | Model Penelitian.....                                | 20 |

### **III. METODE PENELITIAN**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.1   | Jenis Penelitian.....                              | 21 |
| 3.2   | Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data .....        | 21 |
| 3.3   | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..... | 22 |
| 3.3.1 | Variabel Independen .....                          | 22 |
| 3.3.2 | Variabel Dependen .....                            | 23 |
| 3.4   | Teknik Alat Analisis .....                         | 24 |
| 3.4.1 | Pengujian Reliabilitas dan Validitas.....          | 24 |
| 3.4.2 | Uji Korelasional .....                             | 24 |

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 4.1 | Responden Penelitian..... | 26 |
| 4.2 | Data Penelitian .....     | 30 |

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 4.3 | Alat Uji Statistika .....       | 30 |
| 4.4 | Hasil Pengujian Hipotesis ..... | 32 |

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 36 |
| 5.2 | Saran .....     | 37 |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel.1    Statistika Deskriptif ..... | 31      |
| Tabel 2    Hasil Uji Korelasi .....    | 33      |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1 Grafik Persentase Jenis Kelamin .....       | 26      |
| Gambar 2 Grafik Persentase Pendidikan Terakhir ..... | 27      |
| Gambar 3 Grafik Persentase Lama Bekerja.....         | 28      |
| Gambar 4 Grafik Persentase Usia.....                 | 29      |
| Gambar 5 Grafik Persentase Jabatan .....             | 30      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I     Data Penelitian

Lampiran II    Uji Validitas

Lampiran III   Uji Reabilitas

Lampiran IV    Kuesioner

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi telah menanamkan sejarah bagi otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut mengandung sebuah pengertian bahwa otonomi daerah merupakan usaha memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.

Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, terjadilah desentralisasi fiskal yang menjadikan daerah memiliki kuasa untuk mengelola dana keuangan yang dimulai melalui sebuah penganggaran. Pengelolaan keuangan selanjutnya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan sumber keuangan daerah. Alokasi ini juga menyentuh aspek pengembangan sumber daya manusia yaitu pegawai daerah yang bersangkutan.

Karena pengelolaan keuangan sepenuhnya ada di tangan Pemda, kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan dengan baik, mutlak dibutuhkan. Sebagaimana Bastian (2006:2) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, dan akuntabel.

Sumber daya manusia memiliki peran penting di dalam organisasi karena dapat meningkatkan kinerja organisasi telah banyak ditemukan di dalam penelitian-penelitian yang terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia menunjukkan peran penting SDM terhadap kinerja Pemda.

Ongkorahardjo, dkk (2008), Faizin dan Winarsih (2008), Puspitasari (2009), dan di tahun terakhir dilakukan oleh Hadi (2012), Hersona, dkk (2012) adalah beberapa peneliti yang telah memberikan bukti empiris pada organisasi publik dan sebagian lagi ditemukan pada organisasi swasta. Temuan ini menjadi alasan mengapa organisasi perlu menjadikan sumber daya manusia menjadi aset penting dan selalu berupaya melakukan investasi untuk mengembangkan sumber daya manusia di organisasi.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Seperangkat Undang-undang yang dimaksud tersebut

adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- g) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perubahan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan otonomi daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang secara keseluruhan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan. Sebagai pengguna anggaran negara wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pemerintah kepada stakeholder

adalah laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk dalam laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut

kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Dampak dari ketidaktepatan waktu mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau resiko minimalnya keputusan yang diambil kurang berkualitas, meskipun tidak salah.

Selanjutnya, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tingkat satuan kerja (SKPD) berhubungan dengan beberapa faktor, baik dalam proses penyusunan hingga menyampaikannya. Faktor-faktor tersebut antara lain latar belakang pendidikan, pelatihan, ketersediaan fasilitas, dan pemahaman peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana hubungan latar belakang pendidikan SDM pada SKPD terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- 2) Bagaimana hubungan pelatihan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- 3) Bagaimana hubungan ketersediaan fasilitas dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) Bagaimana hubungan pemahaman peraturan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui hubungan latar belakang pendidikan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- 2) Mengetahui hubungan pelatihan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3) Mengetahui hubungan ketersediaan fasilitas dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) Mengetahui hubungan pemahaman peraturan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor faktor yang berhubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Manfaat bagi pemerintah kabupaten, dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan pembenahan terhadap faktor – faktor yang berhubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu dalam hal latar belakang pendidikan SDM, pelatihan terhadap SDM, ketersediaan fasilitas, dan pemahaman peraturan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Teori Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Hasibuan (2009:69 dalam Hadi, 2012). Jika diimplemetasikan di dalam pengembangan SDM maka pengembangan SDM merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, dan moral SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal I ayat 9 menyatakan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Gomes (2003: 197) mengemukakan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya. Definisi teori pelatihan juga telah disimplifikasi oleh Simamora (2006: 273) sebagai proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Selanjutnya, Notoatmodjo (2009: 16) menjelaskan bahwa

pelatihan merupakan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Dari keseluruhan penjelasan tentang pengembangan SDM dan pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan performa karyawan dan pegawai sehingga kinerja organisasi tempat mereka bekerja akan meningkat sebagai hasil dari meningkatnya performa.

Dalam teori pelatihan, selanjutnya Notoatmodjo (2009) menambahkan bahwa pengembangan SDM dapat dilihat dari sisi makro dan mikro. Secara makro, pengembangan SDM merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan manusia untuk mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Secara mikro, pengembangan merupakan suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal, baik berupa jasa maupun benda atau uang.

## **2.2 Laporan Keuangan SKPD**

### **2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Undang Undang Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

### **2.2.2.. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan SKPD**

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

- i) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Ayat 2 bagian (a) menyatakan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 yang menyatakan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas:
  - Menyusun RKA-SKPD.
  - Menyusun DPA-SKPD.
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
  - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada daerah melalui sekretaris daerah.

### **2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan SKPD**

Tujuan laporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### **2.2.4. Komponen Laporan Keuangan SKPD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk dalam laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

**i). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

**ii). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**iii). Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**iv).Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

**v). Neraca**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa Neraca memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu atau akhir tahun anggaran. Informasi tentang kekayaan SKPD dan sumber-sumbernya tersaji dalam laporan keuangan ini.

**vi). Laporan Arus Kas**

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

**vii). Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan fungsi buku besar pembantu, CaLK tidak hanya merinci lebih jauh rekening-rekening dalam laporan keuangan tersebut, tetapi juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode, dan dasar penentuan dan penyajian angka-angka laporan keuangan. Selain itu, di dalam CaLK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka laporan

keuangan. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 5 Ayat 2.

#### **2.2.5. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini yang dijelaskan pada PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I dan II merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- i) **Relevan.** Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- ii) **Andal.** Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- iii) **Dapat Dibandingkan.** Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- iv) **Dapat Dipahami.** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

## **2.3 Penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis**

### **2.3.1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan**

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi disampaikan dalam waktu lama maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan

### **2.3.2. Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat (Nazier, 2009 dalam Darno, 2011). Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya. Akan lebih baik jika para pegawai yang menangani pembuatan laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

SKPD yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan SKPD. Kegagalan SKPD dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009).

Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

Wibowo (2013) menyatakan bahwa akhir akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Masalah- masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan penerimaan pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan.

H1 : Pendidikan berhubungan positif dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### **2.3.3. Pelatihan**

Menurut DeCenzo dan Robin (1999:227) dalam Zunarli (2004), pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relative pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan diadakan pelatihan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan prilaku yang ditekankan dalam program program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari hari para karyawan (Zurnali, 2004). Penguasaan terhadap beban kerja yang dimiliki akan

meningkatkan produktifitas kerja seseorang. Dengan produktifitas kerja yang tinggi, penyelesaian pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat tercapai. Menurut Sastradipoera (2002), pengembangan SDM mencakup baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman lingkungan keseluruhan maupun pelatihan yang menambah keterampilan dalam melaksanakan tugas yang spesifik. Hipotesis terkait dengan penjelasan di atas adalah:

H2: Pelatihan berhubungan positif dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **2.3.4. Ketersediaan Fasilitas**

Ketersediaan fasilitas adalah kelengkapan dalam kuantitas maupun kualitas dari fasilitas, sarana dan prasarana, serta pendukung lainnya untuk menyusun laporan keuangan SKPD. Menurut Sampelalong (2007: 74-75), faktor ketersediaan fasilitas dapat diketahui dengan dua indikator. Pertama, apakah fasilitas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sudah memadai. Kedua, apakah sarana dan prasarana (komputer, sistem informasi manajemen) sudah memadai. Kelancaran proses penyusunan laporan keuangan daerah didukung oleh sarana dan prasarana, baik yang berupa perangkat keras maupun lunak. Sarana dan prasarana tersebut sangat diperlukan untuk memfasilitasi implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang nantinya diharapkan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Karena sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, dalam hal ini keberadaan sarana dan

prasarana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap waktu yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, maka pengembangan hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Ketersediaan fasilitas berhubungan positif dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

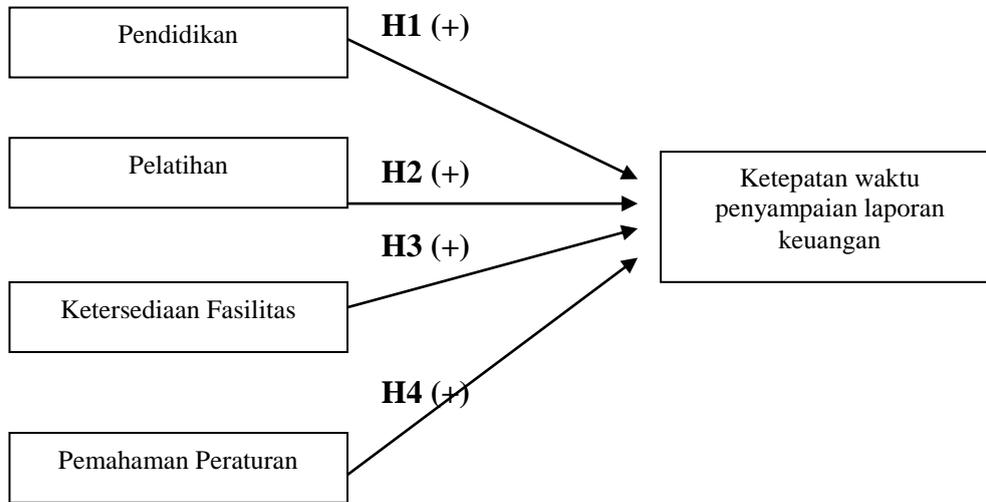
### **2.3.5. Pemahaman Peraturan**

Pemahaman peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana responden sebagai pelaku pengelola keuangan daerah dalam memahami peraturan peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terkait dengan pemahaman terhadap peraturan, masing-masing tenaga pengelola keuangan daerah harus menguasai apa yang harus dilakukan dan disiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semakin baik pemahaman responden pengelola keuangan daerah, semakin mudah responden tersebut mengelola keuangan daerah sehingga semakin tepat dan cepat proses penyusunan laporan keuangan daerah.

Dari penjelasan ini dan dengan berdasar pada teori yang ada, diajukanlah hipotesis keempat dari penelitian sebagai berikut:

H4: Pemahaman peraturan berhubungan positif dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

**MODEL PENELITIAN**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (dalam Harahap, 2009), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara 4 variabel independen yaitu pendidikan (X1), pelatihan (X2), ketersediaan fasilitas (X3) dan pemahaman peraturan (X4) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **3.2 Pemilihan sampel dan Pengumpulan Data**

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat SKPD yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu subbag keuangan di masing- masing SKPD.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan (Umar, 2009). Data primer ini diperoleh dari pengisian kuesioner oleh staf di subbag keuangan

yang bekerja di SKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai variabel-variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.3.1 Variabel Independen**

##### **a. Pendidikan (X1)**

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden atau perangkat SKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Indikator pengukuran pada variabel pendidikan difokuskan pada: (1) level pendidikan (S2; S1; D3; SMA; di bawah SMA), dan (2) latar belakang pendidikan.

##### **b. Pelatihan (X2)**

Pelatihan adalah adanya peningkatan atas nilai penyusunan laporan keuangan daerah melalui pembelajaran yang diadakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya terhadap perangkat kerja daerah yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Pelatihan diukur berdasarkan seberapa sering perangkat SKPD mengikuti pelatihan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. . Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin.

**c. Ketersediaan Fasilitas (X3)**

Ketersediaan fasilitas adalah kelengkapan dalam kuantitas maupun kualitas dari fasilitas, sarana dan prasarana, serta pendukung lainnya dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Variabel diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin.

**d. Pemahaman Peraturan (X4)**

Pemahaman peraturan adalah sejauh mana responden sebagai pelaku pengelola keuangan daerah dalam memahami peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD yaitu Permendagri no 13 tahun 2006, Permendagri no 59 tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintahan. . Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin.

**3.3.2 Variabel Dependen****Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y)**

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi disampaikan dalam waktu lama maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin.

### **3.4 Teknik Alat Analisis**

#### **3.4.1 Pengujian Reliabilitas dan Validitas**

Menurut Singarimbun (1989), Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Kriteria pengukuran reliabilitas dengan *Cronbach's alpha*, yaitu: jika  $\alpha < 0,6$  diindikasikan tidak reliable, nilai antara 0,6 - 0,7 diindikasikan *acceptable*, nilai 0,7 – 0,8 diindikasikan baik dan nilai lebih dari 0,8 diindikasikan sangat baik.

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun, 1989). Menurut Ghazali (2006), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koesioner tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Uji ini digunakan untuk menguji apakah indikato-indikator yang digunakan dapat mengonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Dikatakan valid jika nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA)  $> 0.50$ .

#### **3.4.2 Uji Korelasional**

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasional untuk mengetahui hubungan variabel independen (pendidikan, pelatihan, ketersediaan fasilitas dan pemahaman

peraturan) terhadap variabel dependen (ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan), dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dengan pendekatan variabel, alat analisis penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Ketepatan waktu} = a + b_1 \text{Pendidikan} + b_2 \text{Pelatihan} + b_3 \text{Fasilitas} + b_4 \text{Pemahaman} + e$$

Di mana :

Kinerja = Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

a = Konstanta

$b_{1-4}$  = Koefisien regresi

e = error term

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan hasil bahwa terdapat tiga variabel yang berhubungan signifikan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yaitu pelatihan, ketersediaan fasilitas dan pemahaman terhadap peraturan. Hasil ini memberikan implikasi bahwa kepala pemerintah di daerah Tulang Bawang harus memperhatikan beberapa hal, seperti pejabat keuangan di daerah harus dibekali dengan pelatihan yang cukup terkait dengan penyusunan laporan keuangan, memastikan bahwa pejabat keuangannya memahami setiap perangkat aturan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa fasilitas (seperti sistem dan teknologi) harus dicukupi karena akan sangat mempengaruhi kemudahan mereka di dalam penyusunan laporan keuangan.

Pelatihan yang dijalani para pejabat akan membuat mereka paham sisi-sisi yang harus dilakukan oleh bawahan mereka terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Ditambah lagi dengan pemahaman pada standar, aturan pemerintah dan perundang-undangan, akan semakin menjadikan pejabat keuangan menguasai permasalahan keuangan daerah. Karena pejabat keuangan bukanlah pihak yang akan membuat laporan keuangan, mereka hanyalah pihak yang akan

memverifikasi laporan keuangan tersebut yang telah disusun bawahannya.

Namun, pemahaman yang baik dari atasan akan sangat mempengaruhi keseriusan bawahan dalam menyelesaikan urusan keuangan dengan baik pula.

Ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan urusan pekerjaan harian juga akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan. Semakin baik sistem informasi yang digunakan, semakin mudah menjalankan kegiatan harian tersebut dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan benar.

Latar belakang pendidikan memiliki hubungan yang positif juga di dalam penelitian ini. Berarti latar belakang pendidikan tenaga keuangan yang berasal dari S1 akuntansi berhubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hubungan ini tidak ditemukan signifikan. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa adanya pelatihan lebih memegang peranan di dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

## **5.2. Saran**

Walaupun secara umum penelitian ini telah sejalan dengan teori, namun hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dikarenakan responden yang digunakan di dalam penelitian ini hanya berjumlah 64 orang yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian memiliki generalisasi yang lebih baik.

# **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006 (a), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlanga, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006 (b), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Darno, 2013. Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Faizin, A., dan Winarsih. 2008. Hubungan tingkat pendidikan dan lama kerja Perawat dengan kinerja perawat di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. *Berita Ilmu Keperawatan* Vol . 1 No.3: 137-142
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Hadi, Agatha Liany. 2012. Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas dan Kinerja Karyawan GIANT Pulosari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol 1, No 1: Semester Ganjil 2012/2013
- Hasibuan, Malayu SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hersona, H. Sonny, Rismayadi, B., Mariah, Euis Siti. 2012. Analisis pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Manajemen*. Vol. 09 No.3: 717-729
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Jakarta.
- Mujiati Hanik, 2008. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008", *Tesis S2*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Ongkorahardjo, Martina Dwi Puji A., Antonius Susanto, dan Dyna Rachmawati. 2008. Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1: 11-21
- Puspitasari, Dwi Endang. 2009. Analisis pengaruh pengembangan karier berbasis kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai (Studi kasus pelaksana administrasi Institut Pertanian Bogor). *Unpublish paper*.  
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/11815>
- Sampelalong, Matius, 2007, "Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tana Torajqa, 2007", *Tesis S2*, Program Pascasarjana Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . STIE YKPN Yogyakarta
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Warisno, 2009, Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi. *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
- Zulganef, MM. 2006. Konsep Persamaan Struktural dan Aplikasinya Menggunakan AMOS 5. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Zurnali, Cut. 2004. Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia, Tbk. Tesis Bandung: Universitas Padjajaran.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.